

Analisis pengaturan KUR/UMKM dalam perbankan di Indonesia

Fauzia Pradipta, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20291053&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mengenai kredit bank umum kepada UMKM dalam perbankan di Indonesia. Pengaturan yang dibahas dalam skripsi dilihat dari sebelum dan setelah pencabutan Peraturan Bank Indonesia mengenai kredit kepada usaha kecil.

Pokok permasalahan skripsi ini ialah bagaimana peraturan perundangan-undangan mengatur pemberian kredit bank umum kepada UMKM dan bagaimana setelah adanya pencabutan peraturan mengenai pemberian kredit bank umum kepada usaha kecil, serta dampak-dampaknya. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deskriptif. Pengaturan mengenai kredit bank umum kepada UMKM secara teknis lebih banyak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Dalam skripsi ini dikatakan bahwa perlu adanya ketegasan pengaturan agar Bank Pelaksana KUR agar terikat untuk tetap menyalurkan KUR, dan adanya peraturan pelaksana yang baru untuk Undang-Undang tentang UMKM.

<hr>

This thesis deals with the regulations General bank credit to UMKM (Micro, Small, Medium Business) in banking in Indonesia. The regulations discussed in the thesis as seen from before and after the lifting of Bank Indonesia Regulation of credit to small businesses.

The subject matter of this thesis is how all regulations govern the credit distributing of UMKM and how after the repeal of the regulation on the ditributing of bank loans to small businesses, and also the effects of those regulations. This thesis is the juridical research based on normative principles of legal norms by means of a written descriptive representations. The regulations on general bank credit to UMKM technically more based on the regulation of the Minister of Finance Of the people's Business Loan Guarantee Facilities.

In this thesis it is stated that the need for firmness regulations so that the Bank?s executive order is bound to remain KUR and also new inplementing regulations on UMKM Act.